

Penyelenggaraan Administrasi Dalam Mendukung Good Governance

Dinda Oktania Siregar*¹, Elida Florentina Sinaga Simanjorang², Yudi Prayoga³

^{1,2,3}Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, Indonesia

Email: dindaoktania930@gmail.com buelida.dosenku@gmail.com prayogayudi03@gmail.com


Submitted: 10-11-2022

Revised : 30-12-2022

Accepted: 23-01-2023

ABSTRACT. *The paradigm shift from government to governance emphasizes cooperation in equity and balance which leads to public administration. Participation, the rule of law, transparency, responsiveness, consensus building, equality, effectiveness and efficiency, and responsibility are the governance proposed in this research. The subject and object of this research are the General Affairs and Finance section of the Secretariat of the Regional People's Legislative Assembly of South Labuhanbatu Regency. The research aims to analyze whether or not there is an influence of administration in supporting the implementation of good governance. This study used the descriptive qualitative method. This study's data were collected through observation and structured interviews with related employees. The theoretical implications of this study indicate that administration influences supporting good governance. This proves that administration has an important role in terms of community service, with good service it can be stated that good governance has been implemented in the general and financial sections of the secretariat of the Regional People's Representative Council of South Labuhanbatu Regency. The practical implications of this research can be useful for organizational leaders, namely in encouraging increased employee performance in the general and financial departments through good administration.*

Keywords: *Administration, Good Governance, Finance.*

 [HTTPS://DOI.ORG/10.31538/MUNADDHOMAH.V3I4.307](https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i4.307)

How to Cite Siregar, D. O., Simanjorang, E. F. S., & Prayoga, Y. . (2023). Penyelenggaraan Administrasi Dalam Mendukung Good Governance . *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(4), 398-405.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan suatu negara dapat di nilai dari kemampuan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu sebagai pelayan masyarakat. Pemerintahan merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh sebuah organisasi melalui nama kekuasaan suatu negara yang pada saat menjalankan fungsinya melibatkan prosedur pemilihan pemerintah, pergantian pemerintah dan akuntabilitas, kehormatan dan hak-hak warga negara dan kemampuan negara untuk merancang dan menggunakan kebijakannya (Jameel et al., 2019). Pemerintahan negara di Indonesia terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kekuasaan sebagai badan legislatif daerah yang memiliki hak dan kewajiban atas pemerintahan daerah dengan tugas utama yaitu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD Kabupaten yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah era reformasi, pemerintahan yang baik mulai berkembang di Indonesia. Berbagai isu yang muncul adalah kekuatan pendorong di balik ini. Konstitusi, lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berfungsi secara efisien, dan penindasan kontrol sosial yang dihasilkan dari keterlibatan

publik, semuanya menjadi alasan tuntutan pemerintah orde baru, yang menempatkan presiden di jantung otoritas. Namun dalam praktiknya, mereka belum menemukan pemahaman yang kuat tentang apa itu *good governance*, sehingga sulit untuk mewujudkan ide ini dengan sukses. Pemerintah mengambil keputusan untuk menjadikan *good governance* sebagai landasan atau inti dari cita-citanya, (Handayani dan Nur, 2019).

Tata pemerintahan yang baik tidak hanya di lihat dari prosedur yang di jalankan, tetapi juga dilihat dari struktur yang mampu mengarahkan hubungan sosial-ekonomi dan politik ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Guna mencapai tata pemerintahan yang baik maka diperlukan *good governance*. *Good governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan, pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*), *governance* banyak dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, sektor publik, hukum, dan pelayanan publik, *Good Governance* memiliki karakteristik sebagai berikut, partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab (Setiawan, 2018). *Good governance* di tandai dengan kepercayaan publik, hal itu dikarenakan kedua hal tersebut memiliki keterikatan secara langsung. *Good governance* akan melahirkan kepercayaan di kalangan masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis. Desentralisasi pemerintahan tertuju pada sesuatu yang diperintahkan untuk dilakukan oleh pemerintah modern dalam mencapai pemerintahan yang baik. Keadilan, kejujuran, kesetaraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, mengacu pada proses penyelenggaraan pemerintahan melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang luas di bidang ekonomi, sosial, dan politik serta pemanfaatannya.

Selaku pelayan publik, pemerintah juga memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan demikian untuk mencapai tujuan pemerintahan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pengelolaan pelayanan publik. Menurut Simanjourang, dkk (Simanjourang et al., 2021) untuk memenuhi maksud dan tujuannya, lembaga membutuhkan kinerja pegawai yang efektif. Kompetensi kerja, komitmen kerja, dan kualitas sumber daya manusia dapat berdampak pada kinerja pegawai. Selain itu, Simanjourang juga mengemukakan bahwa memperbaiki kinerja pegawai yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan sasaran utama pelatihan (Simanjourang, 2019). Pelatihan dibutuhkan untuk mengisi kekurangan kinerja. Pengelola pelayanan publik biasa di rangkum dalam suatu sistem administrasi. Sistem administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang pegawai atau lebih yang berlandaskan pada rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh organisasi (Marliani, 2018). Selain itu, administrasi juga sering dikatakan sebagai sistem tata usaha. Setiap organisasi di tuntutan untuk memiliki system administrasi yang mampu menempatkan fungsi aparatur pemerintah pada tempatnya. Sistem pemerintahan pada Sekretariat DPRD memiliki tiga peranan penting, antara lain yaitu urusan administrasi, urusan persidangan serta urusan data dan informasi. Urusan administrasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhanbatu Selatan terdiri dari keprotokoleran, kehumasan, pengaduan masyarakat, kepegawaian dan organisasi, perencanaan dan keuangan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan Barang Milik Negara, serta administrasi umum.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya: 1) Apa saja kegiatan administrasi pada bagian umum dan keuangan sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan? 2) Apa Faktor pendukung dan Faktor penghambat Kinerja Bagian Umum dan Keuangan Dalam penyelenggaraan administrasi di sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan? 3) Bagaimana Kinerja administrasi pada bagian umum dan keuangan sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mewujudkan Good Governance?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidak pengaruh dari penyelenggaraan administrasi dalam mendukung terlaksananya *good governance*.

LANDASAN TEORI

Penyelenggaraan Administrasi

Secara umum, administrasi di definisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat, pengardipan dokumen dan pencatatan peristiwa yang terjadi (Anisa Martadala et al., 2021). Administrasi merupakan proses pelayanan terhadap publik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam memberikan pelayanan secara maksimal (Saggaf et al., 2014).

(Leman, 2019) mengutip pengertian keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan undang-undang no 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, dimana administrasi merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan administrasi pemerintahan merupakan perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan sebuah pelayanan masyarakat yang menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melakukannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat nya (Barat, 2018).

Good Governance

Secara umum *Governance* diartikan sebagai kebiasaan, praktik, nilai-nilai, dan organisasi yang termasuk di dalamnya kekuasaan suatu negara dan dijalankan dengan melibatkan prosedur pemilihan pemerintah, penggantian pemerintahan serta pertanggungjawaban pemerintah, kehormatan dan hak warga negara serta kesanggupan negara untuk menyusun dan menggunakan kebijakan, *good governance* tidak hanya prosedur tetapi juga suatu struktur yang mengarahkan kehidupan sosial-ekonomi dan politik hubungan dan itu berlaku untuk banyak fitur atau elemen seperti administrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan suara, daya tanggap dan supremasi hukum (Jameel et al., 2019).

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohevititas sosial dalam lingkungan masyarakat (Barat, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian penelitian yang sifatnya deskriptif dan umumnya di pakai dalam fenomena sosial, deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan 5W+1H (*What, who, when, where, why, and how*) terkait fenomena yang terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020).

Subjek dari penelitian ini merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini subjek penelitian merupakan pegawai yang bekerja pada bagian umum dan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Guna melakukan penelitian, maka di perlukan data-data yang sifatnya mendukung penyelesaian penelitian. Data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Menurut (Sugiyono, 2017) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara terstruktur dan observasi. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

menganalisis situasi yang ada dan menemukan masalah yang terjadi secara nyata dengan menghubungkannya dengan penyebab dari masalah tersebut secara bersamaan, sedangkan observasi di definisikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat kegiatan yang dilakukan secara langsung (Syam, 2018). Penelitian ini juga di dukung dengan data sekunder. Data sekunder di definisikan sebagai data yang di peroleh melalui sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Pada artikel ini, proses analisis data dilakukan secara ekstensif dengan menggunakan metode pengumpulan data skunder yaitu melalui studi pustaka (*literature review*). Tujuan tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi dari permasalahan dengan mencari berbagai referensi atau sumber terkait, termasuk buku, artikel ilmiah, dan temuan penelitian. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara menganalisis data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang terjadi pada bagian umum dan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Labuhanbatu Selatan dibentuk dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, dimana susunan organisasinya terdiri dari kepala sekretariat, bagian umum dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan serta bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan. Pada Bagian Umum dan Keuangan terdapat tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang Program dan Keuangan.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program kerja pada Subbagian Program dan Keuangan;
2. Penyusunan RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
3. Penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
4. Perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
5. Pemverifikasian keuangan dan pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan;
6. Pengkoordinasian kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
7. Penyusunan dan pemverifikasian kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
8. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
9. Pengadministrasian dan pembukuan keuangan Sekretariat DPRD;
10. Penyusunan Sistem Pengendalian Internal (SPI);
11. Pengkoordinasian kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
12. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
13. Persiapan penganalisaan laporan keuangan dan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj);
14. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
15. Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD;
16. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
17. Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
18. Pemberian saran dan pertimbangan, telaahaan, laporan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program kerja pada Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Pelaksanaan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
3. Pelaksanaan tata naskah dinas dan sistem kearsipan
4. Penyelenggaraan jasa surat menyurat, dan penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan serta penggandaan;
5. Penyelenggaraan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan untuk Anggota DPRD dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD
6. Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja;
8. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan beban kerja;
9. Penyediaan jasa administrasi keuangan, jasa tenaga penunjang administrasi/teknis pemerintah daerah
10. Penyelenggaraan urusan Asuransi kesehatan (medical checkup) Pimpinan dan Anggota DPRD
11. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian
12. Penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
13. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan perencanaan penyediaan tenaga ahli fraksi dan Tim Ahli DPRD
14. Penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan (DUK) dan formasi pegawai
15. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
16. Pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA

Subbagian Rumah tangga mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang Rumah Tangga. Subbagian Rumah Tangga mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program kerja pada Subbagian Rumah Tangga;
2. Pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
3. Pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan halaman dan taman di Komplek Sekretariat DPRD
4. Pelaksanaan pengaturan dan pengolahan keamanan kompleks Sekretariat DPRD
5. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
6. Persiapan pengadaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
7. Pelaksanaan pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
8. Perencanaan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
9. Penyelenggaraan penyediaan, pengurusan, penyimpanan, dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
10. Persiapan pengaturan dan pengelolaan BBM kendaraan dinas di Sekretariat DPRD
11. Pelaksanaan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
12. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan

13. Pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Bagian Umum dan Keuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik atau bisa dikatakan bahwa *good governance* telah terlaksana dengan baik. Terlaksananya *good governance* juga tidak terlepas dari penyelenggaraan administrasi yang baik. Penyelenggaraan administrasi yang baik pada bagian umum dan keuangan dapat terlaksana dengan beberapa faktor pendukung. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor pendukung yang dikemukakan oleh beberapa narasumber, salah satunya yaitu Ibu Aprilia Anggi Lestari selaku Staff Administrasi Umum, yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan administrasi terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat memudahkan sistem administrasi yang baik terlaksana. Faktor pendukung tersebut antara lain, hubungan antar pegawai dan budaya organisasi. Kemudian pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Achmad Hidayat selaku Staff Administrasi Sub Bagian Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa hubungan baik antar pegawai membuat penyelenggaraan administrasi di bagian umum dan keuangan lebih mudah terlaksana. Dan selanjutnya berdasarkan pendapat dari bapak Afandi Romadon Harahap selaku Staff Administrasi Sub Bagian Penatausahaan Keuangan, dimana beliau menyatakan bahwa Faktor pendukung nya yaitu adanya hubungan baik yang terjalin antar setiap pegawai, hubungan yang baik membuat pegawai lebih mudah untuk saling bekerjasama dan berkomunikasi, dengan begitu sistem administrasi akan lebih mudah terlaksana. Dengan adanya faktor pendukung tersebut, membuat para pegawai di bagian umum dan keuangan bekerja dengan lebih nyaman dan penuh semangat. Hal tersebut tentunya memberikan dampak bagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau biasa dikatakan pelayanan publik.

Pelayanan administrasi pada bagian umum dan keuangan dikatakan baik karena mampu melayani masyarakat dengan perlakuan yang jujur, melayani dengan sewajarnya, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Pelayanan administrasi tentunya dapat mendukung *good governance*, sehingga pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan *good governance* telah terlaksana. Hal tersebut ditandai dengan kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah yang semakin membaik, serta kondisi sosial juga ikut membaik. Selain itu *good governance* juga di tandai dengan perubahan di lingkungan instansi, seperti hal nya terjadinya komunikasi untuk berbagi informasi dengan lebih baik, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan sistem manajemen yang berubah menjadi lebih baik.

Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dapat dijabarkan faktor penghambat nya sebagai berikut. Pertama, berdasarkan wawancara dengan narasumber Bernama Afandi Romadon Harahap selaku Staff Administrasi Sub Bagian Penatausahaan Keuangan, beliau menyatakan bahwa Faktor penghambat nya yaitu pegawai yang keahliannya berbeda dengan tanggung jawab kerjanya, hal tersebut tentu saja akan menghambat pekerjaannya. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada bapak Ahmad Hidayat, beliau menyatakan bahwa Pegawai yang memiliki kemampuan di bawah kebutuhan yang diperlukan, itu membuat pegawai tersebut akan kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Terakhir dilakukan wawancara dengan ibu Aprilia Anggi Lestari, beliau menyatakan bahwa Terdapat faktor penghambat yang akan membuat penyelenggaraan administrasi pada bagian umum dan keuangan akan terlaksana. Faktor penghambat tersebut, antara lain yaitu, pegawai yang kurang berkompeten dan memiliki kemampuan yang kurang sesuai dengan pekerjaannya serta fasilitas yang kurang memadai.

Keberhasilan Kinerja Bagian Umum dan Keuangan dalam Mendukung good governance di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terlihat dari

1. Kemudahan dalam pengurusan, hal tersebut terbukti dari pada saat masyarakat melakukan pemberian surat atau berkas-berkas, diberikan kemudahan seperti selesainya berkas-berkas tersebut dan sampainya surat tersebut kepada anggota DPRD yang dituju lebih cepat dari sebelumnya.
2. Mendapatkan pelayanan yang wajar, seperti masyarakat yang dilayani secara setara tanpa memperhatikan status sosial nya;
3. Ketepatan waktu, hal tersebut terlihat dari pada saat masyarakat mengurus berkas-berkas yang kemudian diselesaikan dengan waktu yang dijanjikan tanpa meminta *fee* dari masyarakat tersebut;
4. Mendapat perlakuan yang jujur, hal tersebut seperti pegawai yang memberitahukan mengenai apakah pimpinan nya dapat menandatangani berkas tersebut atau tidak, itu dijelaskan dengan detail mengenai alasannya;
5. Sarana dan prasarana, itu terbukti dari masyarakat yang dimudahkan dalam melakukan proses administrasi, seperti di bantu untuk mencetak berkas atau memfotocopy berkas-berkas yang kurang, tanpa perlu pergi keluar untuk melakukan hal tersebut.

KESIMPULAN

Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi memiliki pengaruh dalam mendukung good governance. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan administrasi memiliki peran penting dalam hal pelayanan masyarakat, dengan pelayanan yang baik maka dapat dinyatakan bahwa good governance sudah di terapkan pada bagian umum dan keuangan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penyelenggaraan administrasi dalam mendukung good governance memiliki beberapa faktor penghambat seperti sumber daya manusia yang kurang berkompeten dalam menjalankan wewenang terkait pekerjaan bada bagian umum dan keuangan, selain itu juga kurangnya fasilitas pendukung yang dapat memudahkan pegawai dalam bekerja. Selain itu juga terdapat beberapa faktor pendukung seperti hubungan baik antara kepala secretariat dengan pegawai-pegawai yang berwenang pada bagian umum dan keuangan, serta budaya organisasi yang dapat membangun rasa kekeluargaan tanpa mengesampingkan sikap profesionalisme dalam bekerja.

Implikasi praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pimpinan organisasi, yaitu dalam mendorong peningkatan kinerja pegawai pada bagian umum dan keuangan melalui penyelenggaraan administrasi yang baik.

REFERENSI

- Anisa Martadala, D., Redi Susanto, E., & Ahmad, I. (2021). Model Desa Cerdas Dalam Pelayanan Administrasi (Studi Kasus: Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI)*, 2(2), 40–51.
- Barat, P. P. (2018). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Jameel, A., Asif, M., & Hussain, A. (2019). Good governance and public trust: Assessing the mediating effect of E-government in Pakistan. *Lex Localis*, 17(2), 299–320. [https://doi.org/10.4335/17.2.299-320\(2019\)](https://doi.org/10.4335/17.2.299-320(2019))
- Leman, M. Y. (2019). Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 19(1), 97–113. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss1.70>

- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, 5(4), 17–18.
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Saggaf, S., Salam, R., Kahar, F., & Akib, H. (2014). Pelayanan Fungsi Administrasi Perkantoran Modern. *Jurnal Ad'ministrare*, 1(1), 20–27.
- Simanjorang, E. F. S. (2019). PENGARUH PELATIHAN, LINGKUNGAN KERJA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. KAPUAS BESAR DESA AEK KOTA BATU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA. *Jurnal Ecobisma*, 6(1), 46–59. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ecobisma/article/view/19>
- Simanjorang, E. F. S., Limbong, C. H., & Harahap, N. J. (2021). ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LABUHANBATU. *Business Management Journal*. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/business-management/article/view/2449>
- Syam, E. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Data Mahasiswa Dan Dosen Terintegrasi. *It Journal Research and Development*, 2(2), 45–51. [https://doi.org/10.25299/itjrd.2018.vol2\(2\).1220](https://doi.org/10.25299/itjrd.2018.vol2(2).1220)